

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi (Kusnandar dan Wantoro, 2012). Pada saat ini pemerintahan pusat tidak secara langsung menangani daerah, pemerintahan pusat telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur keuangan dan pengalokasian dana untuk kepentingan daerahnya sendiri hal ini disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Peraturan perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk setiap daerah yang ada di Indonesia yaitu untuk meningkatkan perekonomian yang kemudian akan berdampak pada kemajuan Negara Indonesia. Peraturan ini juga salah satu upaya pemerintahan untuk

meningkatkan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan melalui adanya beberapa faktor yang membantu seperti sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sumber daya alam (SDA) yang memadai dan modal, dengan adanya faktor-faktor tersebut selanjutnya bisa dibentuk manajemen untuk membantu pertumbuhan tersebut dan kemudian manajemen tersebut bisa membeli teknologi atau hal-hal yang dibutuhkan. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang semakin meningkat pula kemudian hal ini akan membuat pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat juga akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap belanja modal hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian Dhani (2012) menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Belanja modal daerah bisa dilihat dari pembelian aset tetap sebagai bentuk pelayanan publik, hal ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah. Semakin tinggi belanja daerah maka akan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Belanja modal bisa berupa pembelian tanah, jalan, gedung, mesin dan lain-lain. Realisasi pembelian aset-aset daerah pemerintahan daerah memperoleh dana dari berbagai sumber pendanaan, seperti dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan sebagainya.

Kenaikan ekonomi adalah salah satu dampak positif dari sistem desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia, akan tetapi sistem desentralisasi juga memiliki dampak negatif yaitu ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat (Mulyani, 2010). Daerah yang memiliki potensi fiskal yang lebih tinggi akan sangat menguntungkan karena pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerahnya sendiri, akan tetapi bagi daerah yang mengalami potensi fiskal yang rendah maka akan adanya tekanan untuk pembangunan daerah disebabkan rendahnya pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari berbagai hal seperti dari pajak, retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah dan lain-lain. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah harus melakukan upaya-upaya tertentu misalkan meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintahan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi didaerah tersebut seperti memberikan izin kepada industri-industri. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Mardiasmo dalam Mulyani, 2010)

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menerangkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Oktober 2012 mencapai 99,58 persen, dari target Rp 241

miliar, saat ini sudah mencapai Rp 240,1 miliar. PAD yang realisasinya yang hampir 100% , akan direalisasikan pada belanja modal atau ke yang lainnya. Besarnya pengaruh PAD terhadap anggaran belanja modal di tunjukan pada hasil penelitian Widiyanto (2010) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pemerintahan pusat melakukan pendanaan yang sama rata terhadap daerah-daerah, yang disebut dengan dana alokasi umum untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal antar daerah, dana alokasi umum ini bisa membantu daerah yang memiliki potensi fiskal yang rendah. Dana Alokasi Umum menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%. (Kusnandar dan Wantoro, 2012). Pengaruh DAU terhadap belanja modal diperkuat oleh hasil penelitian Widiyanto (2010) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Setiap akhir periode dari pembukuan keuangan pemerintah daerah maka akan ada sisa lebih pembiayaan anggaran atau defisit, sisa lebih pembiayaan anggaran akan digunakan pada anggaran keuangan periode didepanya atau yang akan datang, maka dari itu SiLPA akan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal hal ini diperkuat oleh penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. SiLPA merupakan selisih dari penerimaan dan pengeluaran anggaran tahun lalu.

Luas wilayah dalam sebuah pemerintahan daerah sangat mempengaruhi kekayaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah karena semakin luas wilayah sebuah daerah maka wajib pajak daerah tersebut akan semakin banyak pula. Jika wilayah sebuah pemerintahan daerah semakin luas tentunya masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut semakin banyak hal ini akan membuat pemerintahan akan semakin banyak melakukan belanja modal sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Kepadatan penduduk disebuah wilayah mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintahan daerah dalam bentuk pelayanan publik, sebalik itu penduduk yang banyak juga akan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu indikator untuk mengukur kebutuhan pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum adalah jumlah penduduk dan luas wilayah (Aziz dan Wulandari, 2013).

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda, Pada hasil penelitian Dhani (2012) menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, berbeda dengan hasil

penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan hasil penelitian juga ditunjukkan pada variabel pendapatan asli daerah, pada hasil penelitian Widiyanto (2010) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, berbeda dengan hasil penelitian Dhani (2012) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Perbedaan hasil penelitian juga ditunjukkan pada variabel dana alokasi umum, hasil Penelitian Widiyanto (2010) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, berbeda dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yaitu DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan adanya perbedaan hasil-hasil penelitian, penelitian ini bisa diteliti lagi untuk lebih dikonsistenkan lagi.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), penelitian ini menambahkan tiga variabel independen yaitu variabel sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah dan Kepadatan Penduduk, variabel sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah diambil dari penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012), sedangkan variabel kepadatan penduduk diambil dari penelitian Aziz dan Wulandari (2013). Peneliti mengambil dua variabel tersebut, karena belum banyaknya penelitian yang meneliti tentang pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Review terhadap penelitian terdahulu yaitu penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) tidak konsisten pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Dhani (2012) juga menunjukkan tidak konsisten pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, hal ini juga membuat peneliti ingin peneliti kembali dengan harapan bisa memberikan hasil yang konsisten. Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin meneliti tentang **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal ?

4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal ?
5. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal ?
6. Apakah Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.
5. Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
6. Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Belanja Modal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian ini dicapai maka diharapkan dapat memberikan manfaat hal-hal berikut ini :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dibidang pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Belanja Modal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak pemerintahan daerah dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan khususnya mengenai pengalokasian anggaran Belanja Modal.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menambah bukti empiris bagi akademisi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilyah dan kepadatan penduduk terhadap pengalokasian belanja modal.